

Tahapan Kegiatan Pembuatan Inovasi SITANJAK

No	MILESTONE	KEGIATAN	WAKTU	BUKTI DUKUNG	MANAJEMAN RISIKO	MITIGASI RISIKO
JANGKA PENDEK (6 September – 31 Oktober 2023						
	Perencanaan	1. Penyampaian rencana proyek perubahan pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	6 Sept 2023	Dokumentasi Pertemuan	Tingkat kesibukan Mentor	Disiapkan Koordinasi diawal
		2. Melakukan rapat dan memaparkan kepada Inspektur Inspektorat Kabupaten Natuna dan tim proyek perubahan	14 Sept 2023	Undangan, Daftar Hadir, Dokumentasi	Tingkat Kehadiran Undangan	isiapkan undangan online dan rapat disediakan zoom meeting
		3. Konsultasi dan koordinasi kepada Mentor agar proyek perubahan	14 Sept 2023	Wakil Bupati	Mentor ada di tempat	Dihadiri juga oleh Sekda dan Kepala Bappeda
	Milestone Pelaksanaan (Pembuatan Aplikasi)	1. Pembentukan Tim Efektif	09 Okt 2023	Dokumentasi Pertemuan	Koordinasi internal terkait Tim	Rapat Internal di BPKPD
		2. Pembuatan SK Tim	10 Okt 2023	Undangan dokumentasi	Mempertimbangkan usulan dari Sekban dan Kabid	Memepertimbangkan usulan dari Sekban dan Kabid
		3. Rapat dengan BPKPD, Inspektorat dan Bagian Hukum dalam membangun komitmen, khususnya penyusunan Ranperbup	13 Okt 2023	Dokumentasi Pertemuan	Koordinasi dengan stakeholder	Rapat Internal di BPKPD
		4. Penyusunan Regulasi Perbup tentang TGR	18 Okt 2023	Draft	Memastikan bahwa regulasi tidak bertentangan dengan hokum yang berlaku	Disiapkan Skema penyusunan Laporan Akhir Kegiatan

		5. Rapat Lanjutan Pembahasan Draf Perbup tentang TGR	23 Okt 2023	Draft Akhir	Memutuskan berbagai aspek terkait dengan Ranperbup	Memastikan bahwa peraturan yang akan dikeluarkan memiliki dasar hukum yang kuat
		6. Koordinasi dan konsultasi proyek	25 Okt 2023	Surat Tugas	Bertemu Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri	Memastikan dukungan dari Ditjen Keuangan
n		7. Penyampaian usulan Perbup tentang TGR	30 Okt 2023	Surat pengantar	Pembahasan Rancangan yang sudah diasistensi Bag Hukum	
		8. Penetapan Perbup TGR	03 Nop 2023	Perbup		
		9. Rapat rencana Penyusunan Draf Alur dan SOP TGR	06 Nop 2023	Draft Alur		
n		10. Penetapan Alur dan SOP	10 Nop 2023	SK dan SOP		
		11. Sosialisasi Perbup No 45 Tahun 2023 tentang TGR	20 Nop 2023	Surat Undangan kepada semua OPD		
JANGKA MENENGAH (Nopember s.d Desember 2023)						
	Sosialisasi Lanjutan Perbup No 45 Tahun 2023 tentang TGR	Memastikan semua pihak memahami tentang aturan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	27 Des 2023			-

JANGKA PANJANG (Jan 2024 – Maret 2025)

	Pengembangan sistem	Menyiap Aplikasi Lanjutan	Menyesuaikan			
--	---------------------	---------------------------	--------------	--	--	--

Oleh karena itu, penting untuk terus memantau capaian perubahan terhadap rencana perubahan dan manfaat proyek perubahan sepanjang jalannya proyek. Evaluasi yang teratur membantu mengidentifikasi masalah atau hambatan yang mungkin muncul, memungkinkan perbaikan yang diperlukan, dan memastikan bahwa tujuan perubahan tetap tercapai.

Selain itu, melibatkan pemangku kepentingan dan tim proyek dalam proses evaluasi ini dapat memperkuat dukungan mereka terhadap perubahan dan membantu dalam mengoptimalkan hasilnya. Dari langkah tersebut, berikut ditampilkan indikator keberhasilan proses tahapan dan kegiatan dari proyek perubahan sebagai berikut:

Indikator Keberhasilan

No	Tahapan dan Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Output	Penentu
1	Melakukan koordinasi dengan pimpinan dan instansi yang terlibat	Komitmen Bersama	Dukungan Stakeholder	• Mentor • Tim Efektif • Komunikasi efektif antar <i>Stakeholder</i>
2	Pembuatan SK Tim	Penetapan SK Tim	SK Tim	• Mentor • Tim Efektif
3	Penyusunan Regulasi Perbup TGR	Perbup tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	Perbup TGR sesuai dengan aturan yang lebih tinggi	• Mentor • Tim Efektif • Inspektorat • Bagian Hukum
4	Penyusunan Mekanisme Alur Kerja dan SOP	Kualitas Hasil dan Penyelesaian SOP tepat waktu	Dokumen Alur dan SOP	• Mentor • Tim Efektif
5	Integrasi sistem informasi penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah	Akurasi data, keamanan data, efisiensi dan efektif	Sistem Informasi terintegrasi	• Tim Efektif • IT

1. Tahap Perencanaan

Tahapan perencanaan proyek perubahan adalah salah satu langkah kunci dalam manajemen proyek perubahan. Ini melibatkan perencanaan, perumusan strategi dan penyusunan rencana kerja yang akan mengarahkan pelaksanaan perubahan.

Pada tahap perencanaan awal adalah penyampaian rencana proyek perubahan pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dilaksanakan pada tanggal 6 September 2023 akan pentingnya proyek perubahan tersebut karena dari sisi akuntabilitas dan aspek hukum pengelolaan keuangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dilakukan agar apabila dalam pelaksanaan dibutuhkan anggaran mendapat dukungan dari TAPD. Pada kesempatan tersebut, seluruh tim mendukung proyek perubahan dengan tujuan pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel.



Rapat Pemaparan Rencana Proper dengan TAPD, 6 September 2023



Kemudian selaku Project Leader melakukan rapat dan memaparkan kepada Inspektur Inspektorat Kabupaten Natuna dan tim proyek perubahan yang akan dibentuk dalam rapat yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2023 di Ruang Rapat BPKPD Lantai I. Dari rapat tersebut menurut inspektur, proyek perubahan ini menjadi salah satu solusi penyelesaian TGR yang ada dalam matrik temuan, beliau berharap proyek tersebut selesai dengan jadwal yang telah ditentukan: Dari hasil rapat tersebut, terdapat beberapa hal yang diidentifikasi, antara lain:

1. Identifikasi alasan dan tujuan perubahan

Pada tahap ini, tim proyek perubahan harus mengidentifikasi alasan-alasan utama kebutuhan perubahan dan tujuan yang ingin dicapai melalui perubahan tersebut. Ini melibatkan analisis masalah yang ada, peluang perbaikan dan visi perubahan.

2. Penyusunan tim proyek

Memilih dan menyusun tim proyek sesuai dengan keahlian dan pengalaman yang diperlukan untuk merencanakan dan mengelola perubahan dengan sukses.

3. Pemahaman Terhadap *Stakeholder*

Identifikasi dan pemahaman mendalam terhadap pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang mempengaruhi dan mencakup pihak internal dan eksternal yang memiliki peran dalam proyek perubahan.

4. Analisis Dampak dan Pengelolaan Risiko

Analisis dampak untuk memahami bagaimana perubahan akan mempengaruhi berbagai aspek organisasi, termasuk pegawai, proses dan sistem. Kemudian identifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi pelaksanaan proyek perubahan dan tindakan mitigasi untuk mengatasi risiko tersebut.

5. Perumusan Strategi Perubahan

Tim proyek perubahan akan merumuskan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan perubahan tersebut. Ini termasuk pemilihan pendekatan, langkah-langkah dan sumber daya yang dibutuhkan.

6. Pengembangan Rencana Kerja

Rencana kerja yang terinci untuk melaksanakan strategi perubahan meliputi jadwal, anggaran, tugas, tanggung jawab dan sumber daya yang diperlukan.



7. Komunikasi dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Komunikasi yang efektif kepada pemangku kepentingan, sangat diperlukan agar memahami perubahan, maupun dukungan mereka terhadap perubahan.

8. Pengelolaan Risiko

Identifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi pelaksanaan proyek perubahan dan merencanakan tindakan mitigasi untuk mengatasi risiko tersebut.

9. Pengukuran dan Evaluasi

Indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan perubahan dengan memperhatikan tujuan perubahan.

Tahapan perencanaan proyek perubahan ini membantu memastikan bahwa perubahan dilaksanakan dengan terstruktur, tujuan yang jelas, dan strategi yang baik dan berhasil dalam mencapai tujuan perubahan yang ditetapkan.

Kemudian untuk mendapat dukungan dari mentor yaitu Wakil Bupati pada tanggal 15 September 2023 di ruang Wakil Bupati Natuna, dilakukan konsultasi dan koordinasi agar proyek perubahan yang diusulkan mendapat dukungan, dalam pertemuan tersebut disampaikan *milestone* jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang dilengkapi kegiatan dan waktu pelaksanaan agar tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Pada kesempatan itu dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna dan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.



2. Tahap Pelaksanaan



Tahapan pelaksanaan proyek perubahan adalah langkah dimana rencana perubahan yang telah disusun dalam tahap perencanaan dijalankan. Ini melibatkan implementasi tindakan-tindakan konkret yang bertujuan untuk mencapai tujuan perubahan. Tahapan pelaksanaan proyek perubahan memerlukan pengawasan yang cermat, manajemen yang efektif dan adaptasi terhadap perkembangan yang mungkin terjadi selama proses pelaksanaan. Ini adalah tahap yang paling penting dalam manajemen perubahan yang dapat berdampak pada keberhasilan akhir dari proyek perubahan tersebut.

Pada Tahapan ini pelaksanaan proyek perubahan mengacu pada *milestone* jangka pendek yang telah ditentukan sebelumnya, maka sasaran jangka pendek yang telah tercapai yaitu progres implementasi proyek perubahan jangka pendek dilaksanakan mulai 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023.

Dalam rencana kegiatan jangka pendek selama 2 bulan, terdapat 5 kegiatan yang akan di laksanakan. Untuk mendapatkan pekerjaan dengan hasil yang baik dan maksimal dalam proyek perubahan, maka ada 3 kegiatan jangka menengah sudah dapat dilaksanakan pada jangka pendek yaitu kegiatan Sosialisasi penggunaan Sistem Informasi sub kegiatan Membahas penggunaan user dan hak akses dan sosialisasi penggunaan sistem informasi serta kegiatan Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah untuk Pihak Ketiga dan ASN. Adapun Kegiatan-kegiatan yang di laksanakan di Jangka Pendek berupa:

a) Melakukan koordinasi dengan pimpinan dan instansi yang terlibat

Koordinasi dengan pimpinan dan instansi yang terlibat adalah suatu proses yang penting dalam berbagai bidang pekerjaan dan organisasi. Ini melibatkan komunikasi dan kerjasama antara berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Koordinasi dengan pimpinan dan instansi yang terlibat adalah kunci untuk mencapai keberhasilan dalam berbagai proyek, inisiatif atau pekerjaan yang melibatkan banyak pihak. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua orang memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan peran mereka dalam mencapai tujuan tersebut, serta memungkinkan untuk mengatasi permasalahan dan hambatan dengan lebih efektif.

Kegiatan ini diawali dengan rapat pada tanggal 9 Oktober 2023 di Ruang Rapat BPKPD dengan agenda membahas usulan dan skema proyek perubahan dihadiri oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubbag/Kasubbid dan Fungsional di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Hasil rapat tersebut salah satunya adalah pembentukan Tim Efektif internal dengan tugas mendukung proyek perubahan dapat berjalan dengan baik dan optimal.



Rapat Skema Proper Internal
BPKPD, 9 Oktober 2023

Selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2023 dilakukan rapat dengan BPKPD, Inspektorat dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam membangun komitmen khususnya pembahasan rencana penyusunan Peraturan Bupati tentang Tuntutan Ganti Kerugian Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna. Rapat ini seharusnya dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2023 namun dijadikan satu rangkaian kegiatan agar lebih efektif.

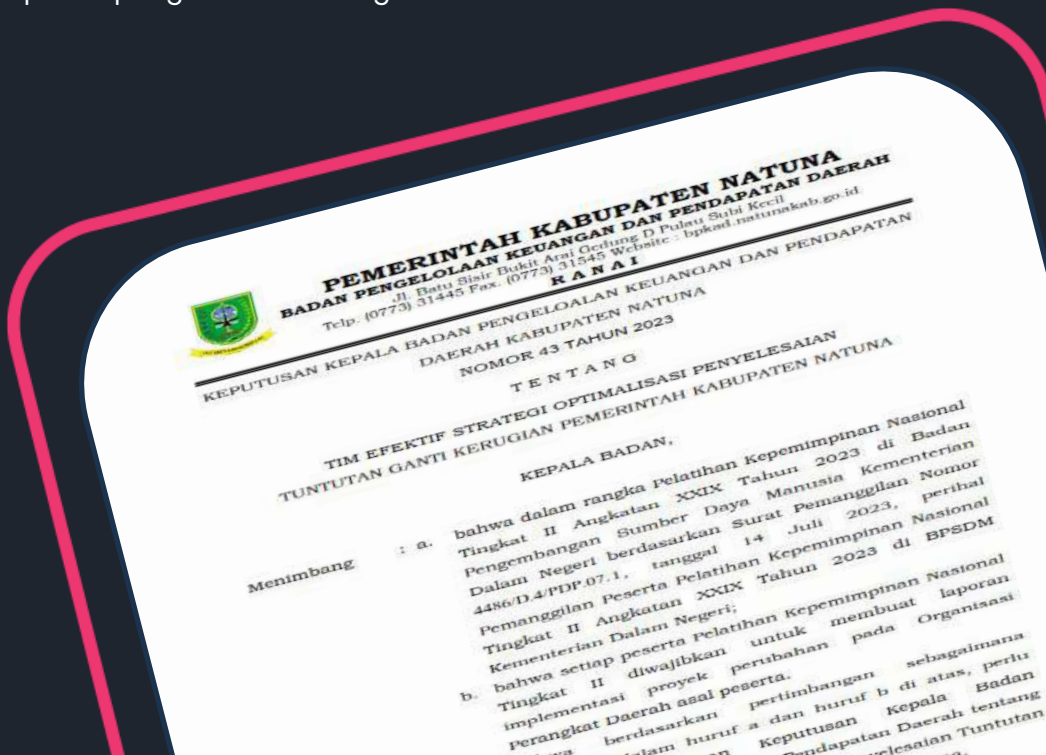
Dalam rapat tersebut disampaikan beberapan hal oleh inspektur bahwa harus segera dilakukan pembuatan Peraturan Bupati tentang TGR agar ada kepastian hukum sehingga menjadi acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal terdapat TGR pihak ketiga.



Rapat Rencana Penyusunan Ranperbup
Proper, 13 Oktober 2023

b) Pembuatan SK Tim

Kegiatan pembentukan Tim Efektif dilakukan rapat pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan usulan dari Sekretaris dan Kepala Bidang, kemudian usulan tersebut ditetapkan pada tanggal 11 Oktober 2023 yang ditandatangani Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna sekaligus sebagai *Project Leader* dengan Nomor Surat Keputusan 43 Tahun 2023. Tim Efektif dibagi 3 (tiga) terdiri dari Tim I (manajemen) dikoordinir oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, yang dibantu oleh pejabat administrator dan pengawas untuk kegiatan penyiapan regulasi terkait peraturan bupati dalam mendukung proyek perubahan. Tim II (administrasi, pengumpul dan pengolah laporan) dikoordinir oleh Sekretaris BPKPD. Sedangkan Tim III (IT) dikoordinir oleh Kepala Bidang Perencanaan Anggaran dengan tugas integrasi aplikasi SI TANJAK dengan aplikasi pengelolaan keuangan daerah.



c) Penyusunan Regulasi Peraturan Bupati tentang TGR

Penyusunan Peraturan Bupati adalah untuk menciptakan aturan-aturan yang efektif, transparan dan adil untuk mengatur tata kelola pemerintahan. Peraturan yang dibuat harus mendukung transparansi dalam pengambilan keputusan pemerintah dan akuntabilitas dalam pelaksanaan regulasi. Keselarasan dengan hukum yang lebih tinggi, termasuk konstitusi, peraturan nasional dan regulasi lain yang berlaku. Ini memastikan bahwa regulasi tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Tujuan utama pembentukan regulasi ini adalah menciptakan kerangka hukum yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, keadilan, perlindungan hak dan kepentingan masyarakat, serta pembangunan berkelanjutan di tingkat kabupaten. Proses penyusunan regulasi ini harus melibatkan keterbukaan, partisipasi dan pemantauan untuk memastikan bahwa regulasi tersebut berhasil mencapai tujuannya.

Pembahasan dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2023 dilakukan rapat dengan BPKPD dan Inspektorat dalam membangun komitmen khususnya pembahasan rencana penyusunan Peraturan Bupati tentang Tuntutan Ganti Kerugian Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna. Hasil rapat pada sebagai berikut:



Rapat Pembahasan Lanjutan Ranperbup TGR dengan Tim Efektif, 16 Oktober 2023

- Inspektorat mendukung proyek perubahan karena temuan hasil pemeriksaan harus diselesaikan, khususnya menyangkut temuan yang lama seperti TGR pihak ketiga ataupun ASN yang sudah pensiun;
- Dengan adanya regulasi untuk Non ASN ataupun pihak ketiga yaitu rekanan pemerintah, memberikan kepastian penyelesaian dan adanya langkah-langkah nyata untuk penyelesaian TGR tersebut;
- Integrasi aplikasi dibutuhkan dalam rangka pemantau temuan sehingga pergantian pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak menjadi hambatan penyelesaian karena informasi dapat disajikan secara tersistem.

Kemudian tanggal 16 Oktober 2023 dilakukan rapat pembahasan draft Peraturan Bupati tentang TGR dengan Tim Efektif, rapat tersebut memberikan masukan-masukan dari sisi regulasi yang selanjutnya diintegrasikan dengan aplikasi yang ada dengan tetap memperhatikan keamanan data dan keberlanjutannya dengan hasil rapat:

- ✓ Peraturan Bupati tentang Tuntutan Ganti Kerugian yang disusun dalam proper ada 2 (dua) untuk ASN dan Non ASN (Pihak Ketiga) dan memperhatikan target penyelesaiannya;
- ✓ Tim I langsung berkomunikasi dengan Inspektorat dan Bagian Hukum dalam rangka pembahasan;
- ✓ Tim IT harus melakukan Analisa segera sesuai dengan pentahapan yang dibuat dan selalu jaga kekompakan tim.

Pada tanggal 23 Oktober 2023 dilakukan rapat lanjutan pembahasan *draft* Peraturan Bupati tentang TGR dengan Tim Efektif. Pertemuan yang dilakukan untuk membahas dan memutuskan berbagai aspek terkait dengan rancangan peraturan. Rapat pembahasan Ranperbup ini melibatkan berbagai pihak, seperti Tim Efektif yang dipimpin oleh Sekretaris BPKPD, unsur pengawasan Inspektorat dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa peraturan yang akan dikeluarkan memiliki dasar hukum yang kuat, relevan dan sesuai dengan aturan yang lebih tinggi, secara ringkas hasil rapat sebagai berikut:

- Peraturan Bupati tentang Tuntutan Ganti Kerugian dibuat bukan hanya untuk proyek perubahan namun akan digunakan untuk Pemerintah Kabupaten Natuna dalam pengelolaan TGR;
- Dalam draft perbup ditambah beberapa perubahan yang akan dibutuhkan pada saat implementasi di lapangan;
- Aplikasi SI TANJAK dapat tambah menu LHP dan LHA yang sangat dibutuhkan oleh Inspektorat pada saat dibutuhkan dikemudian hari.

Selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2023 diadakan koordinasi dan konsultasi proyek perubahan yang disejajarkan dengan kegiatan lainnya dengan Surat Tugas dari Bupati yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah pada tanggal 18 Oktober 2023 dengan nomor: 01714/ST/4.01.03.007/2023 dengan agenda dukungan proyek perubahan strategi optimalisasi penyelesaian TGR Pemerintah Kabupaten Natuna dengan Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Direktur Pendapatan mendukung proyek perubahan sebagai bagian dalam penyelesaian permasalahan TGR di Kabupaten Natuna.



Rapat Rencana Penyusunan Ranperbup
Proper, 13 Oktober 2023



Konsultasi dan Koordinasi ke Direktur Pendapatan Ditjen Keuda Kemendagri, 13 Oktober 2023



© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

Pembahasan rancangan peraturan tersebut sudah dilakukan berkali-kali sehingga pada tanggal 1 Nopember 2023 telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Untuk Pihak Ketiga dan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah lebih cepat dari jadwal yang direncanakan yaitu 3 Nopember 2023. Sehingga dengan ditetapkan peraturan tersebut agenda sosialisasi dapat dilaksanakan secepatnya.

d) Penyusunan Mekanisme Alur Kerja dan SOP

Rencana penyusunan *draft* alur (*flowchart*) dan SOP (*Standard Operating Procedure*) adalah kegiatan untuk menyusun dokumen yang mendefinisikan langkah-langkah, prosedur dan tahapan yang harus diikuti dalam mengatur TGR. Rapat rencana penyusunan *draft* alur dan SOP TGR dilaksanakan pada tanggal 6 Nopember 2023. Dengan hasil rapat sebagai berikut:

- SOP yang menjelaskan secara rinci setiap tahap dalam alur tuntutan ganti kerugian;
- SOP mencakup panduan tentang pengisian *form*, tahapan, kriteria, prosedur dan persyaratan administratif;
- Manajemen resiko hukum harus menjadi bagian integral dari SOP dan pastikan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku;
- Pastikan bahwa semua tuntutan diolah secara tepat dan bahwa langkah-langkah yang diambil sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku;
- Proses penyusunan alur dan SOP TGR harus memastikan keterlibatan pemangku kepentingan dan pemantauan berkelanjutan untuk menjaga kualitas dan efektivitas proses.



Rapat penyusunan draft alur dan SOP TGR,
6 Nopember 2023

Kemudian pada tanggal 7 Nopember 2023 dilanjutkan rapat pembahasan penyusunan *draft* alur dan SOP. Dalam rapat tersebut disimpulkan sebagai berikut:

- Agar proses ini berjalan dengan efisien, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, penyusunan *draft* alur (*flowchart*) dan SOP (*Standard Operating Procedure*) menjadi sangat penting;
- *Draft* alur adalah gambaran visual yang mengilustrasikan langkah-langkah yang harus diikuti dalam pengajuan dan peninjauan TGR;
- SOP harus mencakup pemantauan berkelanjutan terhadap efektivitas alur dan SOP. Evaluasi berkala harus dilakukan untuk memastikan bahwa proses berjalan sesuai dengan tujuan dan memenuhi kebijakan dan peraturan yang berlaku;
- SOP harus mencakup indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas proses tuntutan ganti kerugian;
- Penyusunan alur tetap sederhana dan mudah dimengerti. Terlalu banyak detail atau cabang alur yang rumit dapat membuat alur sulit dimengerti.



Rapat penyusunan alur dan SOP TGR,
6 Nopember 2023

[illegible]

Penetapan alur (*flowchart*) dan SOP (*Standard Operating Procedure*) dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan. Penetapan dan penandatanganan alur (*flowchart*) dan SOP (*Standard Operating Procedure*) telah melalui beberapa proses pembahasan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SOP yang ditetapkan diantaranya SOP Verifikasi Informasi Kerugian Daerah Nomor 27.03.21.2023, SOP Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Untuk Pihak Ketiga Nomor 27.03.22.2023 dan SOP Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Untuk ASN Nomor 27.03.23.2023 efektifitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SOP yang ditetapkan diantaranya SOP Verifikasi Informasi Kerugian Daerah Nomor 27.03.21.2023, SOP Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Untuk Pihak Ketiga Nomor 27.03.22.2023 dan SOP Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Untuk ASN Nomor 27.03.23.2023.

Integrasi sistem informasi adalah proses menggabungkan berbagai sistem komputer atau aplikasi perangkat lunak yang berbeda menjadi satu entitas yang bekerja bersama secara terkoordinasi. Tujuan utama dari integrasi sistem informasi adalah untuk meningkatkan efisiensi, interoperabilitas dan aksesibilitas data, serta memungkinkan berbagai sistem berkomunikasi dan berbagi informasi dengan lebih baik. Integrasi sistem informasi merupakan aspek penting dalam dunia teknologi informasi, terutama dalam organisasi dan perusahaan yang memiliki berbagai sistem berbeda yang harus berinteraksi satu sama lain. Integrasi yang baik dapat membantu organisasi menjadi lebih efisien, adaptif dan responsif terhadap perubahan dalam bisnis dan teknologi. Manajemen proses integrasi sistem informasi membutuhkan manajemen yang baik untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan dengan baik, termasuk perencanaan, implementasi, pengujian dan pemeliharaan.

Pada tanggal 17 Oktober 2023 dilakukan rapat Rapat rencana integrasi data TGR dan SI TANJAK dan INFIS TUKD diruang rapat Kepala BPKPD dengan hasil rapat sebagai berikut:

- Integrasi data memperhatikan data ganda dengan aplikasi SI TANJAK;
- Adanya notifikasi setiap aplikasi bagi ASN maupun Non ASN sehingga memudahkan untuk melakukan pengawasan dan pemantauan;
- Adanya sanksi terhadap ASN yaitu dengan penundaan maupun Non ASN (Pihak Ketiga) yaitu berupa penundaan.

Kemudian pada tanggal 18 Oktober 2023 dilakukan rapat tentang Analisa Bisnis Proses Integrasi/Bridging yang dengan kesimpulan rapat:

- Proses *bridging* aplikasi aman, karena telah melalui berbagai proses data;
- Adanya notifikasi setiap aplikasi bagi ASN maupun Non ASN sehingga memudahkan untuk melakukan pengawasan dan pemantauan.



Rapat kembali dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2023 tentang Integrasi Aplikasi. Pentingnya rapat integrasi aplikasi sangat penting untuk memastikan bahwa aplikasi yang dikembangkan dapat berfungsi dengan baik, memenuhi kebutuhan pengguna dan berkontribusi pada kesuksesan pemerintah daerah, dengan hasil rapat sebagai berikut:

- Konektivitas aplikasi yaitu membangun saluran komunikasi atau koneksi antara aplikasi yang berbeda. Ini dapat mencakup penggunaan antarmuka pemrograman aplikasi (API), protokol komunikasi atau standar yang memungkinkan data dan pesan untuk dikirimkan dan diterima;



Integrasi Aplikasi
19 Oktober 2023

- Mengubah format atau struktur data dari satu aplikasi agar sesuai dengan format yang diperlukan oleh aplikasi lain. Ini diperlukan karena aplikasi dapat menggunakan format data yang berbeda;
- Adanya notifikasi setiap aplikasi bagi ASN maupun Non ASN sehingga memudahkan untuk melakukan pengawasan dan pemantauan;
- Memastikan bahwa data yang ditransmisikan antara aplikasi tetap aman dan terlindungi selama proses integrasi. Hal ini termasuk penggunaan *enkripsi* dan *otentikasi*;

Rapat kembali dilaksanakan pada tanggal 9 Nopember 2023 tentang UAT (*User Acceptance Testing*) merupakan tahap penting dalam siklus pengembangan perangkat lunak yang membantu memastikan bahwa perangkat lunak memenuhi kebutuhan pengguna akhir sebelum dirilis secara luas. UAT juga berfungsi sebagai langkah terakhir dalam validasi perangkat lunak sebelum produksi, yang dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi masalah sebelum memengaruhi pengguna akhir. Dari rapat tersebut dibutuhkan langkah-langkah sebagai berikut:

- Melakukan pengujian fungsional untuk memastikan bahwa semua fitur dan berfungsi sesuai dengan yang diharapkan seperti yang diinginkan. Pengujian dilakukan pada berbagai operasi dan tugas sesuai



UAT (*User Acceptance Testing*)
9 Nopember 2023

- Memeriksa apakah perangkat lunak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen kebutuhan dengan bisnis proses yang telah disusun dan dipastikan bahwa setiap persyaratan telah terpenuhi.
- Jika menemukan bug atau masalah selama UAT, segera melaporkannya kepada tim pengembangan dengan memberikan informasi yang jelas dan detail tentang bug sangat penting untuk mempercepat perbaikan.

Dari hasil UAT dituangkan dalam laporan UAT yang dilakukan oleh tester untuk menjamin bahwa semua fitur dan fungsionalitas yang diimplementasikan berjalan dengan benar dan sesuai dengan harapan. Kemudian untuk memastikan bahwa sistem dapat beroperasi dengan baik dibawah beban kerja yang diharapkan dan memberikan respons yang memadai.

Pada tanggal 20 Nopember 2023, telah dilakukan sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Untuk Pihak Ketiga dan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah kepada Kepala Dinas, Badan, Bagian dan Bendahara melalui surat undangan Nomor 900.1.15.1/BPKPD-UP1/603/XI/2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna. Kegiatan ini adalah kegiatan jangka menengah yang dilaksanakan pada bulan Februari 2025, namun untuk mempercepat proses penyelesaian TGR dipercepat agar tingkat penyelesaian temuan BPK lebih optimal lagi. Pada Kesempatan tersebut disampaikan juga oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna bahwa penyelesaian Tindak Lanjut Hasil temuan dan menjalankan rekomendasi dari hasil pemeriksaan BPK menjadi kewajiban yang harus diselesaikan.

Dalam kegiatan tersebut ada beberapa masalah yang disampaikan seperti penyelesaian temuan yang lama harus dicarikan solusi penyelesaian. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan launching aplikasi SI TANJAK diintegrasikan dengan aplikasi pengelolaan keuangan daerah yang akan digunakan untuk membantu OPD dalam melakukan pemantauan maupun penyelesaian temuan-temuan yang masih belum selesai. Aplikasi yang digunakan sangat membantu dalam rangka penyelesaian temuan karena sudah terintegrasi dari proses pengajuan pencairan dari proses SPP, SPM dan SP2D. Monitoring dapat dilakukan oleh OPD sesuai dengan akses mereka yaitu temuan yang ada di instansi mereka sendiri.



Sosialisasi Perbup 45 & 46 ke ASN, 20 Nopember 2023



Sosialisasi Perbup 45 & 46 ke ASN, 20 Nopember 2023

Pada tanggal yang sama telah dilakukan *Release Production* aplikasi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna. Dengan direleasenyaa aplikasi ini, maka telah resmi penggunaan aplikasi SITANJAK yang telah terintegrasi ke aplikasi keuangan daerah sehingga ke depan dapat membantu seluruh Kepala OPD dan bendahara untuk mempercepat penyelesaian TGR hasil dari temuan ataupun rekomendasi BPK maupun APIP. Dengan integrasi sistem tersebut tentu mempermudah dalam melakukan pemantauan dan penyelesaian karena data temuan sudah satu data.



Release Production Integrasi, 20 Nopember 2023

Pada tanggal 21 Nopember 2023 dilakukan pembahasan penggunaan user dan hak akses, kegiatan ini menjadi rangkaian yang penting karena menyangkut keamanan komputer dan jaringan. Hak akses mengacu pada izin atau batasan yang diberikan kepada pengguna atau kelompok pengguna terkait dengan berbagai sumber daya sistem, seperti file, direktori atau fungsi sistem tertentu. Hak akses membantu mencegah pengguna yang tidak berhak untuk mengakses atau memodifikasi data atau sistem. Hak akses dapat digunakan untuk melindungi data sensitif dan memastikan bahwa hanya pengguna yang berhak yang dapat melihat atau mengubahnya.

Sedangkan pengguna adalah individu atau entitas yang memiliki akses ke sistem komputer atau jaringan. Setiap pengguna memiliki identifikasi unik, seperti nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*).

Pengguna dapat diberikan hak akses tertentu ke berbagai menu dalam sistem berdasarkan OPD mereka masing-masing. Secara umum, hubungan antara pengguna dan hak akses yaitu setiap pengguna memiliki hak akses tertentu yang menentukan sejauh mana mereka dapat berinteraksi dengan sumber daya sistem. Hak akses ini dapat diatur dan dikelola oleh administrator sistem untuk memastikan keamanan, integritas dan kerahasiaan informasi. Penerapan hak akses yang tepat adalah aspek penting dari manajemen keamanan informasi.



Rapat pembagian hak akses & user, 21 Nopember 2023

Kemudian pada tanggal 27 Desember 2023, dilakukan sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Untuk Pihak Ketiga kepada beberapa OPD dan Pihak Ketiga yang masih terdapat TGR yang belum diselesaikan. Rencana kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Maret 2025 merupakan milestone jangka menengah. Memajukan *milestone* dari jangka menengah ke jangka pendek dapat memiliki beberapa tujuan yang strategis yaitu percepatan penyelesaian tindak lanjut yang terdapat TGR. Memajukan *milestone* dapat meningkatkan percepatan dan efisiensi. Ini bisa



Sosialisasi Perbup TGR 45 ke Pihak Ketiga, 27 Nopember 2023



Tujuan dari sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 adalah untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami, menerima dan dapat mematuhi regulasi tersebut. Ini merupakan merencanakan strategi komunikasi yang efektif. Tentukan cara terbaik untuk menyampaikan informasi kepada berbagai kelompok pemangku kepentingan. Selain pertemuan tatap muka, pertimbangkan penggunaan surat, email, *situs web* atau media sosial untuk menyampaikan informasi secara konsisten.

Sosialisasi regulasi yang efektif adalah langkah kunci dalam memastikan bahwa regulasi diterapkan dengan benar dan bahwa semua pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sesuai.